

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Alasan Pemilihan Judul

Gambaran Suram mengenai penderitaan, kesedihan, kelapaparan umat manusia akibat konflik telah lama berlangsung hingga saat ini tanpa suatu penyelesaian yang konkrit menuju suatu perdamaian yang abadi yang dicitacitakan umat manusia di muka Bumi. Satu dari sekian banyak cerita suram ini berlangsung sejak lama di kawasan Asia Selatan tepatnya di Kashmir.

Konflik merupakan gambaran dari sebuah heterogenitas, adanya kepentingan dari pihak yang bertikai, nilai-nilai dan keyakinan yang muncul sebagai formasi baru yang ditimbulkan oleh perubahan sosial yang muncul bertentangan dengan hambatan yang diwariskan¹. Membicarakan Kashmir tidak bisa terlepas dari sejarah masa lampau ketika India menjadi jajahan Inggris dan kemudian mengalami disintegrasi nasional dengan pecahnya India menjadi dua negara bagian yaitu Pakistan dan India sebagai negara induk. Pecahnya India disebabkan oleh faktor perbedaan agama, Pakistan mewakili masyarakat Muslim dan india mewakili masyarakat Hindu.

Pada akhir dari persetujuan pemisahan India dan Pakistan, pemerintah Inggris menyatakan bahwa negara-negara kepangeranan atau kerajaan dapat memilih untuk bergabung dengan India atau Pakistan dengan mempertimbangkan

¹ Hugh Miall, Oliver Ramsbotham dan Tom Woodhouse, *Resolusi Damai konflik kontemporer : Menyelesaikan, Mencegah, mengelola dan Mengubah Konflik Bersumber Politik, Sosial, Agama dan Ras*, Jakarta, PT RajaGrafindo Persada ,2000, hal.7.

komposisi agama dari masyarakat mereka. Tapi hal ini tidak berlaku dalam kasus Kashmir yang terdapat garis perbedaan dengan pemimpin yang beragama Hindu dan memilih India, serta rakyatnya yang mayoritas Islam lebih memilih bergabung dengan Pakistan sebagai negaranya.

Akibatnya muncul gelombang protes dan kemarahan rakyat Kashmir yang dibantu Pakistan, akhirnya Harry Singh sebagai penguasa Kashmir meminta bantuan kepada India, dengan syarat yang diajukan India bahwa Kashmir akan bergabung dengan India. Akibat sikapnya ini menempatkan Kashmir pada suatu wilayah sengketa yang tanpa akhir. Konflik Kashmir yang berkepanjangan tidak sedikit memakan korban jiwa, anak-anak yang kehilangan orang tuanya, rumah, tempat ibadah semuanya hancur akibat konflik ini.

Upaya-upaya menuju perdamaian terus dilaksanakan, namun yang terjadi kemudian adalah kegagalan yang pada gilirannya menghambat proses perdamaian di Kashmir, dan belum ada perubahan signifikan yang dialami dan dirasakan oleh rakyat Kashmir dari segi sosial, ekonomi maupun kebebasan karena masing-masing pihak hanya menonjolkan ego dari kepentingan masing-masing. PBB sebagai organisasi perdamaian dunia belum mampu menyelesaikan konflik ini dan tidak bisa bertindak tegas terhadap pihak-pihak yang melanggar perjanjian. Demikian pula dengan dunia Islam yang hanya mampu mengkritik tanpa bisa berbuat secara konkrit.

Hal ini sangat menarik penulis untuk menganalisa faktor-faktor internal dan eksternal apa saja, sehingga bisa mempengaruhi dan mengakibatkan kegagalan proses perdamaian di Kashmir, karena sampai saat ini Kashmir masih

dalam suasana konflik yang berkepanjangan dari awal pecahnya India hingga saat ini. Dan tulisan ini merupakan sumbangan penulis untuk menambah wawasan kita mengenai konflik di Kashmir.

B. Tujuan Penulisan

Adapun tujuan dari penulisan adalah sebagai berikut

1. Penulisan skripsi ini bertujuan untuk membahas dan menganalisa fenomena yang terjadi di dunia salah satunya adalah konflik. Serta menambah wawasan mengenai konflik yang berlandaskan pada faktor primordialisme agama.
2. Untuk mengetahui faktor-faktor yang menjadi penyebab terhambatnya proses perdamaian di Kashmir
3. Disamping itu penulisan ini juga ditujukan untuk mendapatkan gelar keserjanaan pada Jurusan Hubungan Internasional Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.

C. Latar Belakang Masalah

Kashmir yang terletak di kaki Gunung Himalaya memang patut mendapat julukan surga. Tanahnya subur, pemandangannya indah, dengan sungai-sungainya yang mengalir. *A garden of eternal spring dan an iron fort to a palace of kings* menjadi julukan Kashmir atas keindahan alamnya yang luar biasa. Namun nasib rakyat Kashmir tak seindah dengan julukannya, mereka hidup dalam kegetiran dan ketakutan.

Wilayah Kashmir memiliki keuntungan yang sangat menggiurkan dari segi ekonomi. Kashmir merupakan obyek wisata yang terkenal dengan keindahan alamnya dan juga merupakan pusat industri wol, karpet, serta dengan tanahnya yang subur. Selain itu Kashmir merupakan tempat mengalirnya sungai-sungai besar Indus, Jhelum yang penting bagi sektor pertanian. Dibidang militer, lembah Kashmir adalah tempat yang sangat strategis bagi pertahanan negara dengan wilayahnya yang memiliki topografi pegunungan, serta merupakan wilayah dengan perbatasan dengan banyak negara seperti Afganistan, China, Tibet.

Sebelum Kerajaan Islam Mughol berkuasa pada tahun (1526-1858), Kashmir dikuasai oleh kerajaan Budha dan Hindu. Kemudian Kerajaan Mughol runtuh karena mengalami kekalahan dalam perang melawan Kerajaan Inggris dalam peristiwa *Sepoy Muntiny*. Akibatnya, seluruh daratan India dikuasai oleh Inggris termasuk Kashmir. Namun kemudian Kashmir dijual kepada keluarga Hindu Dogra hingga tahun 1947 pada masa Harry Singh tetapi masih dalam wilayah administrasi Kerajaan Inggris. Pada masa ini Masyarakat Muslim Kashmir mulai mendapatkan tekanan dari pemerintahan Hindu Dogra.

Ledakan konflik Kashmir dimulai karena keinginan masyarakat Muslim untuk membentuk pemerintahan yang berdiri sendiri serta terpisah dengan India dengan mayoritas Hindu. Hal ini terbukti dengan berdirinya Pakistan menjadi negara yang merdeka pada 14 Agustus 1947. "Louis Mountbatten, Raja Muda Inggris di India sebagai perwakilan pemerintah Inggris pada akhir persetujuan pembagian India menjadi negara Muslim dan non-Muslim menyatakan bahwa negara-negara kepangeranan (Princely States) dapat memilih untuk bergabung

dengan salah satu dari kedua negara tersebut dengan mempertimbangkan komposisi agama negara mereka, kondisi geografik serta harapan rakyatnya”².

Faktanya berbicara lain karena Jammu Kashmir berada dalam kekuasaan pemimpin yang beragama Hindu, dalam tindakannya Maharaja Harry Singh bertindak ragu untuk tidak memilih India ataupun Pakistan dan ini menimbulkan keresahan rakyat Jammu Kashmir yang mayoritas ingin bergabung dengan Pakistan karena dari segi historis, emosional dan kultural Kashmir memiliki kedekatan dengan Pakistan karena faktor agama yang sama yaitu Islam, karena dari sekitar 12.000.000 jiwa penduduk Jammu-Kashmir 77 % persen adalah Muslim. Kemudian yang terjadi adalah terbaginya Jammu Kashmir menjadi dua friksi besar antara Muslim (Kashmir) dan Hindu (Jammu).

Sikap Harry Singh ini menimbulkan kemarahan rakyat Kashmir dengan melakukan protes yang dibantu oleh Pakistan yang berdampak pada semakin terdesaknya posisi Harry Singh. Dalam posisi yang demikian, ia meminta bantuan kepada India, PM Jawaharal Nehru bersedia membantu dengan syarat ada jaminan bahwa Kashmir akan bergabung dengan India. Penandatanganan penggabungan wilayah Kashmir dengan India terjadi pada tanggal 26 Oktober 1947 berdasarkan perjanjian asesi. Faktor inilah yang kemudian menjadi awal petaka konflik di Kashmir karena “Pakistan masih mempersoalkan kesahannya perjanjian tersebut karena India tidak pernah melaksanakan referendum seperti yang direncanakan oleh Lord Mountbatten pada tanggal 27 Oktober 1947”³.

² M. Ali Kettani, *Minoritas Muslim di Dunia Derwasa ini*, Jakarta, PT RajaGrafindo Persada, 2005, hal 161.

³ “kisah dibalik kisah kashmir”, on line, www.didyouknow.cd/indonesia/kisah/story, diakses tanggal 21 september 2006.

India maupun Pakistan masing-masing menempatkan tentaranya di Kashmir sehingga meletuslah perang Kashmir yang pertama. "Gencatan senjata diadakan pada tanggal 1 Januari 1949 dengan membuat garis demarkasi di Jammu & Kashmir, yang memisahkan daerah sebelah Timur (lembah Kashmir, Jammu dan Ladakh) dijaga oleh pasukan India, sebelah Barat (dikenal sebagai Azad Kashmir), diawasi oleh Pakistan"⁴. Pesengketaan kedua belah pihak masih belum berakhir karena masing-masing pihak merasa paling berhak untuk menguasai Kashmir secara keseluruhan.

Kini sepertiga atau 33% wilayah Kashmir dikuasai oleh Pakistan dan secara tak tercatat menjadi provinsi kelima di Pakistan dan menangani administrasi Azad Kashmir serta memiliki menteri khusus yaitu menteri urusan Kashmir yang bertanggung jawab secara penuh terhadap wilayah ini dengan jumlah penduduk Muslimnya sekitar 99%. Sedangkan India menguasai sisanya dengan memberikan status khusus yang diatur dalam article 370 of the constitution of India, di mana dari 8 juta penduduknya sekitar 6 jutanya adalah Muslim.

Persaingan (rivalitas) dari negara-negara didekatnya India dan Pakistan telah menempatkan rakyat Kashmir menjadi korban utamanya, karena selama lebih dari 5 dekade konflik rakyat Kashmir menanggung resiko penderitaan. Pada perang India-Pakistan yang pertama terdapat kurang lebih 1.500.000 jiwa pengungsi yang memasuki wilayah Pakistan. Jumlah ini ditambah lagi dengan

⁴ Ibid

pengungsi baru sebagai akibat dari perang India-pakistan kedua dan ketiga pada tahun 1965 dan 1971.

Data dari Amnesty Internasional (London) dan Asia Watch (New York-Washington) menyebutkan, sejak 1990 sampai 1999 saja, sekitar 71.204 rakyat Kashmir telah tewas dibunuh aparat India. Dan belum termasuk yang terluka mencapai 29.561, serta berbagai kerusakan harta benda. Hal yang tak kalah tragisnya terdapat 7.613 wanita telah menjadi korban pemerkosaan⁵. Semua kejahatan tentara India itu didokumenasi oleh Amnesti Internasional, *US Human Rights Watch Asia, Physician for Human Rights, International Commission of Jurists*. India tak hanya menolak permintaan agar menghentikan pemusnahan warga Kahmir itu, tapi juga menutup akses lembaga-lembaga tersebut memasuki Kashmir⁶. Inilah nasib rakyat Kashmir, yang mengalami tragedi kemanusiaan tanpa adanya perhatian dari masyarakat internasional secara proporsional.

Perjuangan rakyat Kashmir sendiri mengalami sebuah dilema, karena jika mereka melakukan perjuangan secara damai maka India akan menganggap kalau Kashmir menerima statusnya sebagai bagian dari India. Namun apabila mereka menggunakan cara perjuangan maka India tidak segan untuk menggunakan cara kekerasan dan militer untuk membungkam perjuangan rakyat Kashmir melalui pasukan daratannya, pasukan para militer, reserse polisi, dan pasukan pengawal perbatasan BSF (border security forces) yang sering melakukan penyerangan dan pembunuhan para pejuang Kashmir ataupun penduduk sipil secara terang-terangan. Saat ini di Kashmir terdapat lebih kurang 600.000 tentara, dan mencap

⁵ Dhurorudin Mashad, *Kashmir : Derita Yang Tak Kunjung Usai*, Jakarta, Khalifa, 2004, hal 3-4.

⁶ “ muslim Kashmir Terkoyak Banyak Kepentingan” on line www.republika.co.id/koran_detail diakses tanggal 21 September 2006.

kalau perjuangan mereka adalah sebuah gerakan separatis dan teroris untuk memberikan citra negatif terhadap perjuangan rakyat Kashmir di dunia internasional.

Dalam kasus Kashmir selain masyarakat mayoritas Muslim terdapat pula minoritas terbesar yaitu orang-orang Hindu yang ingin menjadikan wilayah Jammu Kashmir menjadi bagian integrasi India. India sendiri, tidak hanya berhadapan dengan Pakistan dalam persoalan Kashmir tapi harus berhadapan pula dengan perlawanan-perlawanan rakyat sipil atas pendudukan India di Kashmir, Melihat situasi yang semakin rumit untuk mencapai kebebasan dari belenggu India, membuat perjuangan rakyat Kashmir semakin gencar melakukan perlawanan bersenjata. India menyatakan dan mencah bahwa mereka pejuang Kashmir adalah kaum pemberontak, teroris atau bahkan separatis yang menimbulkan pesan negatif terhadap perjuangan suci para pejuang Kashmir di dunia Internasional, yang berkeinginan untuk memisahkan diri dengan India dan tidak juga bergabung dengan Pakistan.

Munculnya organisasi militan Front Pembebasan Jammu-Kashmir (JKLF) yang berjuang demi kemerdekaan Kashmir yang terbentuk sebagai akibat dari penindasan (repression) dan penganiayaan (oppression) yang dilaksanakan oleh militer tetapi karena jumlah mereka yang tidak terlalu signifikan, maka usaha-usaha mereka untuk melawan kekuasaan akan menjadi sebuah pekerjaan dan perjuangan yang sangat sulit untuk tercapai. Umumnya mereka yang pro Pakistan adalah Muslim, namun diantara umat Islam pun tidak semuanya bersatu, ada yang pro Pakistan, ada yang pro India ada pula yang lebih memilih kemerdekaan.

Menguatnya keinginan sebagian dari rakyat Kashmir dibawah payung JKLF untuk merdeka dan memisahkan dirinya dengan India juga merupakan faktor pemicu gerakan perlawanan terhadap India. Dan ini akan semakin memperumit usaha perdamaian di kashmir. Saat ini yang dibutuhkan rakyat Kashmir adalah melaksanakan referendum, apapun hasilnya bergabung sebagai bagian integrasi India ataupun Pakistan termasuk kemerdekaan dan kedua negara harus rela menerima keputusan rakyat Kashmir.

Politik dalam negeri India terhadap Kashmir yang memiliki pola kekerasan dalam kebijakannya harus dilihat lebih dalam melalui proses pengambilan kebijakannya, politik di India selalu dikuasai oleh dua partai yaitu partai Kongres dan BJP dimana kedua partai tersebut memiliki pijakan yang sama dalam mempertahankan Kashmir sebagai bagian dari integrasi India. Yang lebih ekstrim lagi adalah kebijakan yang diambil oleh partai (Bharatiya Janata Party) BJP yang merupakan kelompok ekstrimis Hindu yang dilandaskan pada inspirasi Hindutva yaitu filosofi Hindu. Dalam pandangannya kaum non Hindu diharuskan mengadopsi kultur dan agama Hindu serta belajar tentang Hinduisme atau “gerakan kultural Hindu yang telah lama hidup dan menekankan bahwa semua orang India yang lahir di India memiliki hubungan suci dengan tanah air, dan adalah orang Hindu, baik mereka menyatakan secara terbuka atau tidak.”⁷ Apabila tidak menerima prinsip tersebut, akan dijadikan sebagai sasaran kekerasan, inilah yang kemudian terjadi pada minoritas Islam di India. Faktor itu pula yang menjadi landasan dalam melaksanakan kebijakannya di Kashmir.

⁷ “ *lonceng kematian sekulerisme di India*”, kompas, 29 April 2002 hal 3

Pakistan menggunakan co-religionist agar Kashmir menjadi bagian integrasinya. Selain itu usaha-usaha yang dilakukan Pakistan adalah terus mengusahakan agar isu-isu mengenai konflik Kashmir dan pelanggaran HAM yang dilakukan oleh India dibawa kedalam forum Internasional melalui Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dan masyarakat Internasional. Sebaliknya India yang menuduh Pakistan bahwa separatis Kashmir hanyalah sebuah rekayasa dari Pakistan. Seperti yang terjadi pada kasus bom Bombay 12 Juli 2006, dalam kasus ini India menuduh bahwa militan Kashmir dibalik pemboman atas dukungan Pakistan yang semakin memburuknya hubungan India Pakistan yang berakibat pada penundaan proses perdamaian.

Memang PBB telah ikut campur tangan dalam menyelesaikan konflik di Kashmir, dengan membentuk komisi yang terkenal dengan nama The United Nations Commission For India and Pakistan (UNCIP). Telah dikeluarkan dua resolusi mengenai Kashmir yang dikeluarkan pada tanggal 13 Agustus 1948 dan 5 Januari 1949 yang garis besar isinya adalah menginginkan agar rakyat Kashmir untuk menentukan nasibnya sendiri (right of self determination) untuk memilih India atau Pakistan melalui referendum atau plebisit dalam pengawasan PBB dan ini telah disepakati oleh India, Pakistan dan masyarakat Internasional. Berikut adalah salah satu dari cuplikan jaminan pemerintah India di bawah pimpinan Nehru terhadap plebisit di Kashmir

“ Kami telah membawa isu Kashmir ke PBB dan memberikan janji pada suatu solusi damai atas Kashmir. Sebagai sebuah bangsa yang besar kami tidak dapat menarik kembali janji itu. Kami telah meninggalkan pertanyaan bagi solusi final

untuk rakyat kashmir dan kami memutuskan untuk berpegang pada keputusan mereka⁸

Diakui bahwa saat ini peran Internasional terhadap kasus Kashmir sangat kecil sekali, terbukti PBB sebagai organisasi perdamaian dunia sampai saat ini belum mampu menyelesaikan konflik Kashmir secara berkeadilan dan tidak mempunyai sikap tegas untuk memberikan sanksi terhadap pihak-pihak yang melanggar perjanjian yang telah disepakati. Ibaratnya macan ompong, walupun besar dan gagah, namun tidak memiliki sikap keberanian yang seharusnya dimiliki PBB sebagai badan Internasional yang memiliki fungsi untuk menyelesaikan konflik.

Bukti ketidakmampuan PBB adalah sikap pengabaian India terhadap resolusi PBB. Pada tahun 1953, India telah mendeklarasikan bahwa tidak ada perlunya mengadakan sebuah plebisit bahkan India telah memaksakan pemilu yang didalamnya penuh kecurangan demi kepentingannya. Bahkan India menganggap bahwa konflik kashmir adalah masalah dalam negeri yang tidak memerlukan campur tangan asing. Karena ada kekhawatiran kalau hasilnya nanti akan merugikan kepentingan nasional India yang menjadikan Kashmir masuk dalam kekuasaan Pakistan. Sedangkan dalam banyak kesempatan dalam forum PBB India selalu memberikan janjinya untuk mengadakan plebisit dalam kasus Kashmir. Inkonsisten India mengakibatkan Kashmir masuk kedalam jurang kesengsaraan yang berkepanjangan..

China, Amerika Serikat, Uni Soviet, Inggris dan Perancis memiliki kepentingan besar dalam memanfaatkan eksistensi konflik Kashmir sebagai

⁸ Ibid, hal. 10.

komoditas untuk mencapai kepentingan nasional mereka. Selain karena letaknya yang strategis, India juga memiliki kekuatan ekonomi yang tangguh serta memiliki sumber daya yang melimpah dan memiliki jumlah penduduk di atas satu milyar jiwa yang merupakan pangsa pasar yang sangat strategis, namun kemajuan yang dicapai India ini ternyata mendapatkan respon negatif dari sebagian negara tadi dengan menjadikan Pakistan sebagai partnernya. Berbeda dengan India, Pakistan memiliki perekonomian yang lemah bila dibandingkan dengan India, apalagi di Pakistan sering terjadinya pergantian kepemimpinan dan kudeta militer. dengan mayoritas penduduknya adalah Islam. “Serta ada ketakutan yang tidak tersembunyikan bahwa dunia barat memang sangat curiga dengan segala hal yang berbau Islam, negara Islam ataupun fundamentalisme Islam. Islam dipandang sebagai momok yang mengancam keamanan hegemoni barat”⁹.

Apalagi setelah runtuhnya gedung WTC pada peristiwa 11 September 2001 yang mengubah pandangan masyarakat internasional terhadap masyarakat Muslim. Sehingga kebijakan luar negeri yang mereka ambil sangat berat sebelah terhadap perkembangan dan penyelesaian konflik Kashmir, karena kepentingan nasional mereka lebih penting jika dibandingkan dengan penderitaan yang harus dialami oleh rakyat Kashmir yang mayoritas penduduknya adalah Muslim.

⁹ Dhurodin Mashad, *Agama dalam Kemelut Politik : Dilema Sekulerisme di India*. Jakarta. PT Pustaka Cidesindo, 1999, hal 117

D. Rumusan Permasalahan

Berdasarkan latar belakang permasalahan di atas, maka muncul suatu rumusan permasalahan, yakni sebagai berikut :

“Faktor-faktor apa saja yang menyebabkan terhambatnya proses perdamaian di Kashmir”?

E. Kerangka Dasar Pemikiran

Untuk menjawab rumusan permasalahan di atas dan menjelaskan serta menggambarkan fenomena konflik di Kashmir, maka penulis menggunakan teori dan konsep. Teori yaitu pekerjaan yang mendeskripsikan apa yang terjadi, menjelaskan apa yang terjadi, dan mungkin juga meramalkan kemungkinan berulangnya kejadian itu dimasa depan¹⁰, sedangkan konsep adalah abstraksi yang mewakili suatu obyek¹¹. Teori yang digunakan adalah teori Konflik dan konsep integrasi sebagai kerangka dasar pemikiran dalam menganalisa faktor-faktor yang menyebabkan kegagalan proses perdamaian di Kashmir.

1. Teori Konflik

Konflik akan selalu ada dalam setiap perubahan sosial yang terjadi didalam masyarakat. Konflik selama ini diidentikkan dengan kekerasan yang meliputi kerusuhan, kudeta, terorisme dan revolusi, konflik terjadi disebabkan adanya benturan kepentingan yang didalamnya terdapat perbedaan pendapat,

¹⁰ Mohtar Mas' oed, *Ilmu Hubungan Internasional Disiplin dan Metodologi*, Jakarta, LP3ES, 1990, hal 185

¹¹ Ibid, hal. 93.

persaingan, pertentangan antara individu dengan individu, individu dan kelompok, kelompok dan kelompok, dan antara individu, kelompok dengan pemerintahan. Masing-masing akan berupaya keras untuk mendapatkan dan mempertahankan sumber yang sama.¹²

Tujuan dari sebuah konflik itu sendiri adalah untuk mendapatkan sumber-sumber daya yang ada dalam rangka pemenuhan kebutuhan, serta mempertahankan sumber-sumber daya tersebut dari pihak-pihak yang dapat merebut dan menguranginya, yang ingin dipertahankan adalah harga diri dan kepentingan dari masing-masing pihak yang berkonflik. Biasanya konflik yang terjadi di dunia ketiga jarang disebabkan oleh satu faktor, dan ada faktor-faktor lain yang menjadi penyebabnya. Di mana faktor-faktor tersebut saling mendukung dan memperkuat.

Pada dasarnya konflik politik disebabkan oleh dua hal. Berdasarkan kemajemukan horizontal dan kemajemukan vertikal. Yang dimaksud dengan kemajemukan horizontal, yakni struktur masyarakat yang majemuk secara kultural, seperti suku bangsa, daerah, agama, dan ras. Sedangkan majemuk secara sosial adalah berdasarkan perbedaan pekerjaan atau profesi. Sedangkan majemuk secara struktur adalah masyarakat yang terisolasi menurut pemilikan kekayaan, pengetahuan dan kekuasaan¹³.

¹² Surbakti, Ramlan, *Memahami Ilmu Politik*, Jakarta, PT Gramedia Widiasarana Indonesia, 1992, hal 149.

¹³ Surbakti, Ramlan, *op. cit.*, hal 151-152.

Ada beberapa pokok konflik yang sering terjadi di dunia ke tiga (miskin dan berkembang) yang dapat dikelompokkan menjadi empat kelompok, yaitu¹⁴ :

1. Perpecahan bangsa
2. Perkembangan yang timpang
3. Bentrokan kultural
4. Gerakan pembebasan.

Bila kita menghubungkan konflik yang terjadi di Kashmir dengan penyebab konflik yang terjadi di dunia ketiga maka terdapat sebuah korelasi yang positif. Konflik yang terjadi di Kashmir berawal dari perpecahan bangsa yang terjadi di India berdasarkan faktor agama yaitu, Hindu (India) dan Islam (Pakistan). Perasaan separatisme kultural akan memeperkuat perasaan-perasaan komunal dan sebaiknya diredam, daripada diserang. Dengan cara ini akan meredam sedikit problem komunalisme, namun hal ini tidak terjadi di India. Bila kita lihat ke belakang dari sejarah, perpecahan India tidak terlepas dari sejarah kolonialisme Inggris di India. Sebelum Inggris masuk, hubungan antara umat Islam dan Hindu dibangun dalam hubungan toleransi oleh penguasa saat itu.

Sengketa wilayah di Inggris dimulai ketika Inggris di bawah pimpinan PM Clement R. Atlee secara tergesa-gesa melakukan dekolonisasi atas wilayah jajahannya termasuk India. Ini dilakukan karena Inggris mengalami krisis keuangan, dan tidak bisa membiayai daerah kolonialnya. Akibatnya, dalam pengaturan dan persiapan kemerdekaan wilayah jajahannya tidak diatur dengan baik. Dan benih-benih konflik yang dulu mengendap muncul bahkan bisa

¹⁴ Christophe Bertram, *Konflik Dunia Ketiga dan Keamanan Dunia*, Jakarta, Bina Aksara 1988, hal 49.

meledak. Ini pula yang terjadi dalam kasus pecahnya India, yang berakibat pada berlarutnya konflik di Kashmir.

Ada beberapa para ahli yang mencoba untuk merumuskan akar-akar atau sumber-sumber konflik. Salah satunya adalah K.J. Holsti yang menyatakan bahwa konflik merupakan masalah tipe-tipe isu yang telah menimbulkan konfrontasi dan perang. Berdasarkan hal di atas, maka konflik dapat dibagi menjadi enam tipe utama tujuan negara atau sumber konflik, yaitu¹⁵ :

1. *Konflik teritorial atau wilayah terbatas*, terdapat suatu pertentangan terhadap pemilikan suatu bagian khusus wilayah, atau hak mengelola wilayah di dalam atau disekitar daerah perbatasan dengan negara lain.
2. *Konflik yang berkaitan dengan komposisi pemerintah*, terdapat pertentangan mengenai siapa yang berhak memimpin negara dan didalamnya terdapat perselisihan ideologis yang kuat.
3. *Konflik kehormatan nasional*, dalam hal ini pemerintah melakukan ancaman atau tindakan militer untuk membersihkan perbuatan yang dianggap salah. Hal ini dapat membuat insiden yang kecil menjadi krisis yang besar.
4. *Imperialisme regional*, dimana suatu pemerintah berusaha menghancurkan kemerdekaan atau kedaulatan negara lain biasanya dengan maksud ideologi, keamanan, dan perdagangan.
5. *Konflik pembebasan atau perang revolusioner* yang dilakukan oleh suatu negara untuk membebaskan rakyat negara lain, dengan alasan etnis atau ideologis.

¹⁵ K.J Holsty, *Politik internasional : Kerangka Untuk Analisa* Jakarta ,Erlangga (Anggota IKAPI), 1988 hal 173-174.

6. *Konflik yang disebabkan dari tujuan pemerintah untuk mempersatukan negara yang terpisah.*

Berdasarkan kajian Holsti mengenai sumber konflik, maka kita bisa menyimpulkan bahwa konflik yang terjadi di Kashmir merupakan konflik yang berkaitan dengan *konflik wilayah terbatas* dan *konflik pembebasan*. Pertentangan dalam soal kepemilikan Kashmir merupakan salah satu penyebab terhambatnya perdamaian di Kashmir. Hal ini dikarenakan masing-masing pihak merasa paling berhak memiliki Kashmir. Harus diakui bahwa Kashmir memiliki fungsi strategis dari segi politik, ekonomi, maupun pertahanan. Pakistan menuntut Kashmir, menjadi bagian wilayahnya karena secara komposisi penduduknya adalah mayoritas Muslim, sedangkan India terikat perjanjian dengan penguasa Jammu-Kashmir Harry Singh. Sikap yang tidak kooperatif dan kaku dari salah satu pihak menjadi salah satu batu sandungan dalam proses perdamaian, ini diperlihatkan oleh India yang hingga saat ini belum juga melaksanakan plebisit seperti yang tercantum dalam resolusi PBB.

Konflik pembebasan, merunut dari pengertiannya adalah perang yang dilakukan oleh suatu negara karena alasan untuk membebaskan rakyat negara lain. Dari komposisi penduduknya yang paling berhak untuk mendapatkan Kashmir adalah Pakistan didasarkan pada kebijakan pemerintah Inggris bahwa negara-negara kepangeranan dapat memilih menjadi bagian India ataupun Pakistan berdasarkan komposisi jumlah penduduk, yang terjadi kemudian adalah India merasa paling berhak untuk mendapatkan Kashmir menjadi bagian dari teritorialnya berdasarkan perjanjian dengan Harry Singh penguasa Jammu-

Kashmir yang Hindu. Pada 27 April 1962, India menyatakan bahwa pemindahan kekuasaan atas Kashmir sudah lengkap, sempurna dan final. Pakistan menyatakan perjanjian itu tidak sah dan berusaha melepaskan Kashmir dari India, akibatnya masing-masing pihak menempatkan pasukannya di Kashmir yang berdampak pada perang terbuka yang terjadi pada tahun 1947, 1965 dan 1971. Akibatnya 33 % wilayah Kashmir menjadi milik Pakistan dan 48 % nya menjadi milik India.

2. Konsep Integrasi

Integrasi nasional adalah proses penyatuan suatu bangsa yang mencakup semua aspek kehidupannya, baik yang ada dalam bidang sosial, politik maupun ekonomi serta budaya. Pada dasarnya persoalan yang muncul dalam proses integrasi adalah bersumber pada terjadinya pergeseran-pergeseran struktur kekuasaan yang diakibatkan berdirinya suatu bangsa¹⁶.

Sedangkan menurut Koentjaraningrat ada empat permasalahan dalam mewujudkan integrasi, yaitu¹⁷ :

1. Masalah mempersatukan aneka warna suku bangsa
2. Masalah hubungan antar umat beragama
3. Masalah hubungan mayoritas-minoritas
4. Masalah integrasi kebudayaan.

Untuk mengatasi permasalahan integrasi yang berkaitan dengan primordialisme dalam hal ini adalah agama. Menurut Myron Weiner terdapat dua strategi yang dapat ditempuh oleh pemerintah, yaitu¹⁸ :

¹⁶ Saafroedin Bahar, A.B Tangdililing, *Integrasi Nasional, Teori, Masalah dan Strategi*. Jakarta, Ghalia Indonesia, 1996, hal 7.

¹⁷ Koentjaraningrat, *Masalah-masalah Pembangunan*. Jakarta, LP3ES, 1982, hal 345.

1. Mengambil kebijakan untuk menghapuskan sifat kultur utama dari kelompok-kelompok minoritas dan mengembangkan suatu kultur nasional
2. Adanya kultur nasional, tetapi kultur daerah masih dilindungi dan dibiarkan berkembang.

Berdasarkan konsep integrasi di atas ada sebuah korelasi yang menghubungkannya dengan konflik Kashmir, yaitu bagaimana upaya yang dilakukan oleh India dalam mewujudkan pemersatuan bangsa berdasarkan teritorial. Permasalahan integrasi di India karena India adalah sebuah bangsa yang sangat heterogenitas dari segi suku bangsa maupun agama dan ini sering sekali menimbulkan perbedaan-perbedaan yang berakibat pada konflik dan tentunya akan menghambat proses integrasi di India. Menurut Coleman dan Roseberg ada dua dimensi dalam proses pemersatuan bangsa yaitu, Vertikal (elite-massa) dan horizontal (teritorial)¹⁹. India memang berhasil menjaga teritorialnya di Kashmir, namun dalam hubungan antara elite dan massanya mengalami ketimpangan dibuktikan dengan kebijakan yang berat sebelah terhadap rakyat Kashmir yang berujung pada usaha untuk melepaskan diri dari India.

India yang selama ini menguasai mayoritas wilayah Kashmir, berusaha mengatasi masalah integrasi dengan menggunakan cara asimilasi. Padahal penerapan strategi asimilasi di negara yang multietnis akan meningkatkan ketegangan kultural dan regional. Strategi yang demikian ini akan lebih banyak menimbulkan ancaman terhadap integrasi daripada mempercepat integrasi. Karena yang selama ini asimilasi yang digunakan oleh India adalah dengan

¹⁸ Saafroedin Bahar, A.B Tangdililing, op, cit. hal 117.

¹⁹ Ibid, hal 4.

penggunaan kekerasan. Pergerakan pembunuhan dan asimilasi menjadi semakin kejam selepas tahun 1990. Rakyat ditahan tanpa sebab dan disiksa hingga mati. Rumah-rumah dirampas, rakyat yang tidak bersenjata dianiaya, serta sekolah-sekolah ditutup²⁰.

Kebijakan dalam hal pemersatuan bangsa (nasionalisme) yang diambil di India adalah dengan menghapus kultur di Kashmir dengan kebijakan Hindutva (etos Hindu), hindurashtra (Bangsa Hindu), ekonomi swadesi serta kebijakan pro Hindu terutama saat India dipimpin oleh partai BJP yang didukung oleh kaum nasioanlisme Hindu dengan slogan mereka Hindukan segala politik dan militerkan Hindu raya. Akibatnya konflik di Kashmir berakhir dengan bencana yang tak berujung tanpa ada usaha menuju proses perdamaian.

Dalam sudut pandang Pakistan wilayah Kashmir harus dikuasai oleh mereka karena berkaitan erat secara etnik, sejarah dan agama dengan Pakistan. Atau dikenal dengan istilah *irredentisme*. Adapun bentuk *iredentis* adalah satu negara menuntut diserahkan suatu wilayah beserta penduduknya yang masih dijadikan bagian dari negara lain. Contohnya adalah kelompok nasionalis Kashmir yang ingin bergabung dengan Pakistan.²¹ Dalam pengertiannya *irredentisme* adalah kehendak rakyat suatu negara untuk menggabungkan wilayah perbatasan yang dimiliki negara lain karena wilayah tersebut dihuni secara luas oleh masyarakat yang memiliki persamaan bahasa atau budaya dengan negara pertama dan merupakan aspek nasionalisme yang memiliki kaitan erat dengan hak untuk

²⁰ www.harunyahya.com/malaysian/buku/kebangkitanislam/kebangkitanislam05.php - 37k. diakses tanggal 27 september 2006

²¹ www.suaramerdeka.com/harian/0306/12/kha1.htm - 11k - Hasil Tambahan diakses tanggal 10 November 2006

menentukan nasib sendiri dan juga merupakan sebuah sumber ketegangan dan konflik internasional.²²

Merupakan hal yang wajar jika dalam perkembangannya Pakistan menuntut agar India melaksanakan plebisit di Kashmir berdasarkan resolusi PBB dan membuat kebijakan yang berupaya menggabungkan wilayah yang berbatasan dengan Pakistan, yang dikuasai oleh negara lain (India) ke dalam wilayah integrasi Pakistan dan ini didukung sepenuhnya oleh kaum nasionalis yang merupakan pro Pakistan.

Dalam perkembangan selanjutnya lahir kelompok perjuangan Kashmir yang lebih memilih kemerdekaan ketimbang menjadi bagian dari integral India ataupun Pakistan. Kelompok ini lahir sebagai bentuk perlawanan dan tindakan balasan terhadap penindasan dan prinsip perjuangannya adalah anti pendudukan asing, dalam payung JKLF yang lahir tahun 1965 mereka berjuang melepaskan diri dari India.

Dalam sudut pandang India mereka disebut gerakan separatis, *Separatisme* politis adalah suatu gerakan untuk mendapatkan kedaulatan dan memisahkan suatu wilayah atau kelompok manusia (biasanya kelompok dengan kesadaran nasional yang tajam) dari satu sama lain (atau suatu negara lain). Biasanya berbasis nasionalisme atau kekuatan religius. Selain itu, *separatisme* juga bisa terjadi karena perasaan kurangnya kekuatan politis dan ekonomi suatu kelompok.²³ Menurut mereka *separatisme* adalah satu-satunya jalan untuk

²² Jack C. Plano dan Roy Olton, *Kamus Hubungan Internasional*. Jakarta, Putra A Bardin, (Anggota IKAPI), 1999, hal 28.

²³ "Separatisme" on line id.wikipedia.org/wiki/Separatisme - 30k diakses tanggal 10 November 2006.

mencapai tujuan mereka yaitu menjadi negara yang merdeka bebas dari pendudukan asing. Begitu pula yang terjadi dalam kasus perjuangan JKLF yang pro kemerdekaan, hal ini terjadi sebagai akibat dari tindakan kekerasan dan penganiayaan yang dilakukan oleh militer India.

F. Hipotesa

Kegagalan proses perdamaian di Kashmir disebabkan oleh beberapa faktor, diantaranya :

1. Faktor-faktor di antara pihak yang bertikai (internal).
 - a. India dan Pakistan menganggap Kashmir memiliki arti penting dan strategis secara ekonomi, politik, serta militer, dan merupakan bagian dari identitas nasional mereka. Serta berkaitan erat secara historis dan kultural.
 - b. Disamping itu di Kashmir sendiri, terdapat friksi-friksi di antara rakyat Kashmir, yakni yang mendukung India atau Pakistan dan bahkan terdapat kelompok pro kemerdekaan seperti perjuangan JKLF, yang masing-masing kelompok memiliki power yang sama untuk meraih kepentingannya.
2. Faktor-faktor di luar pihak yang bertikai (eksternal), ketidakefektifan peran PBB dalam menyelesaikan konflik Kashmir karena ada campur tangan dan perbedaan kepentingan negara-negara besar Amerika Serikat, Inggris, China, Uni Soviet dan Perancis.

G. jangkauan penelitian

Di dalam penelitian ini, penulis memiliki batasan wilayah bahasan dalam konflik Kashmir yaitu sejarah konflik Kashmir serta terjadinya konflik dari tahun 1947 yang diawali dengan invasi tentara India Di Kashmir berdasarkan perjanjian penguasa Kashmir Harry Singh dan Perdana Menteri India Jawaharal Nehru sampai peristiwa bom Bombay pada bulan Juli 2006 yang didalangi oleh militan Kashmir atas dukungan Pakistan berdasarkan tuduhan India yang berakibat pada tertundanya proses perdamaian.

H. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan tehnik pengumpulan data berupa studi dokumen yang dilakukan dengan cara menghimpun data sekunder dalam hal ini diwakili oleh informasi-informasi dari literatur-literatur yang relevan dengan masalah yang diteliti dengan pertimbangan :

1. Pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan data kualitatif yang didasarkan pada penelitian kepustakaan yang meliputi literatur yang relevan, surat kabar, dan internet.
2. Tujuan penelitian ini bersifat deskripsi (menggambarkan) yang bertujuan untuk menjawab pertanyaan apa, siapa, dimana, kapan atau berapa yang berwujud pada pengumpulan fakta yang didapat melalui data kualitatif.
3. Metode berdasar hubungan dengan obyek penelitian adalah unobtrusive yaitu historical comparative research, dengan melihat dari pendekatan sejarah dalam

penjabarannya untuk mengkaji peristiwa berdasarkan kesinambungan waktu dari masa lalu hingga masa sekarang

I. Sistematika Penulisan

- BAB I.** Merupakan bab Pendahuluan yang berisikan aturan-aturan baku penulisan ilmiah, yang terdiri dari : Alasan Pemilihan Judul, Tujuan Penulisan, Latar Belakang Masalah, Pokok Permasalahan, Kerangka Dasar Pemikiran, Hipotesa, Jangkauan Penelitian, Metode Penelitian dan Sistematika Penulisan.
- BAB II.** Berisikan pembahasan mengenai gambaran umum Kashmir yang terdiri dari letak wilayah, demografi, dan kebudayaan serta membahas mengenai sejarah Kashmir pada masa pra kolonial, era kolonial, dan kemerdekaan.
- BAB III.** Berisikan pembahasan tentang faktor-faktor penghambat perdamaian dalam ruang lingkup internal yang terdiri dari arti strategis Kashmir bagi India dan Pakistan secara politik, ekonomi, dan militer. Serta membahas mengenai friksi-friksi yang terdapat di dalam rakyat Kashmir, yaitu yang pro India, pro Pakistan, dan pro kemerdekaan
- BAB IV.** Berisikan pembahasan tentang faktor-faktor penghambat perdamaian secara eksternal yang terdiri dari organisasi internasional, yaitu PBB dan campur tangan Negara-negara besar Amerika Serikat, China, Inggris, Perancis dan Uni Soviet.

BAB V. Berisikan kesimpulan dari seluruh hal-hal yang dikemukakan pada bab-bab sebelumnya.

J. Kerangka Penulisan

Adapun sistematika penulisan skripsi ini terdiri dari lima bab dengan berbagai subtopik pembahasan antara lain :

BAB I. Terdiri atas **Pendahuluan** sebagai berikut,

- A. Alasan pemilihan judul
- B. Tujuan penulisan
- C. Latar Belakang Masalah
- D. Rumusan Permasalahan
- E. Kerangka Dasar Pemikiran
- F. Hipotesa
- G. Jangkauan Penelitian
- H. Metode Penelitian
- I. Sistematika Penulisan

BAB II. **Gambaran umum Kashmir dan sejarah Kashmir**, dengan subbab sebagai berikut :

- A. Gambaran Umum Kashmir
 - 1 Letak Wilayah
 - 2 Demografi
 - 3 Kebudayaan
 - 4 Ekonomi

B. Sejarah Kashmir

1 Pra kolonial Inggris

2 Era kolonial Inggris dan Kerajaan Hindu

3 Pasca Kolonial Inggris

D. Konflik India dan Pakistan

BAB III. Faktor-faktor penghambat perdamaian dalam ruang lingkup internal (konflik India-Pakistan), dengan sub bab sebagai berikut:

A. Arti strategis Kashmir bagi India dan Pakistan

1. India

- a. Politik
- b. Ekonomi
- c. Militer

2. Pakistan

- a. Politik
- b. Ekonomi
- c. Militer

B. Friksi-friksi di dalam rakyat Kashmir

1 Pro India

2 Pro Pakistan

3 Pro kemerdekaan

BAB IV. Faktor-faktor Penghambat Perdamaian Eksternal, dengan subbab sebagai berikut:

A. Perserikatan Bangsa-Bangsa(PBB)

B. Benturan Kepentingan Negara Besar

1. Amerika Serikat

2. China

3. Inggris

4. Uni Soviet

5. Perancis

BAB V. Kesimpulan